



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB II

VISI, TUJUAN, DAN PRINSIP IBU KOTA NUSANTARA

2.1 VISI DAN TUJUAN

Visi Ibu Kota Nusantara adalah “Kota Dunia untuk Semua”. Visi Ibu Kota Nusantara menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara akan menerapkan tata kelola berstandar global, menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara di tengah Indonesia akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi Ibu Kota Nusantara tidak hanya menggambarkan peradaban baru masyarakat yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan, dipertahankan, dan dilestarikan sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan.

Visi Ibu Kota Nusantara tersebut diturunkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu:

1. mewujudkan simbol identitas nasional kota yang mencerminkan jati diri, karakter sosial budaya, keragaman, persatuan dan kesatuan, serta kebesaran bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. mengembangkan kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pengelolaan tata ruang dan lahan yang tertib, pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah dan sanitasi yang bersih dan sehat, pengembangan moda transportasi yang terintegrasi, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, aman, dan lestari; dan



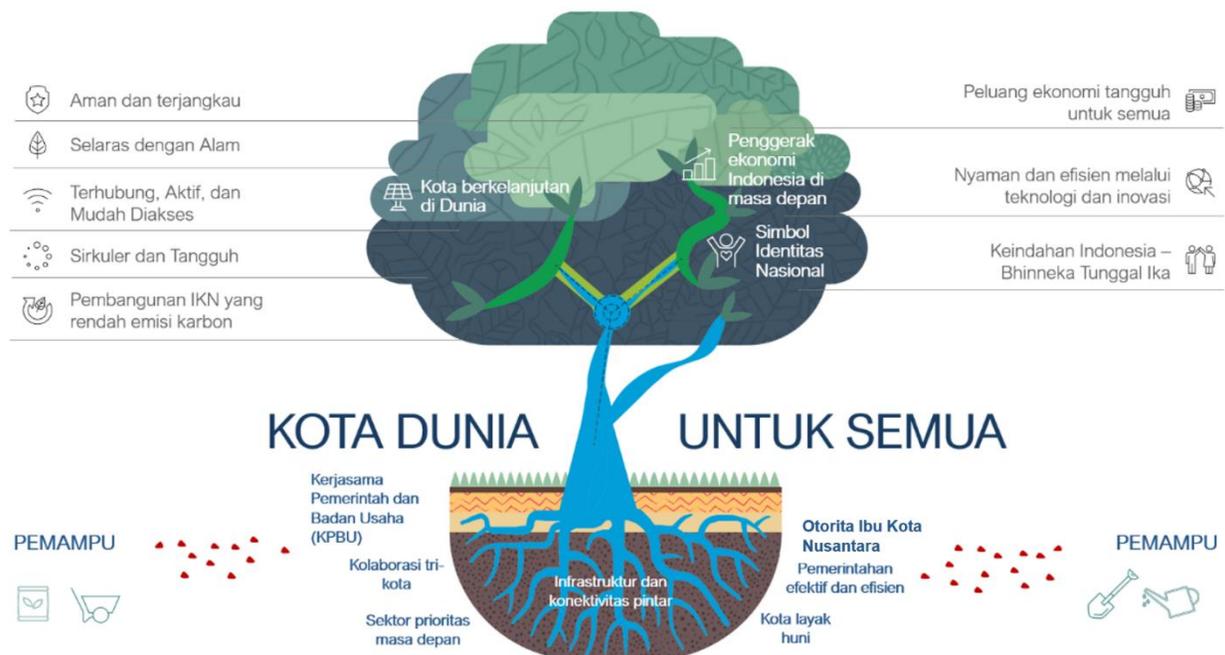
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. menggerakkan ekonomi Indonesia masa depan: kota yang mendorong transformasi sosial ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif, dan kompetitif dengan mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, arsitektur, tata kota, dan keragaman sosial budaya. Ibu Kota Nusantara akan didukung dengan pengembangan ekonomi superhub untuk memastikan penguatan rantai nilai ekonomi domestik dan global dengan mengoptimalkan tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memberikan peluang untuk semua dalam meningkatkan nilai tambah, pendapatan, dan kesejahteraan.

Visi Ibu Kota Nusantara Kota Dunia untuk Semua dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan agenda global dan nasional, antara lain: (1) Visi Indonesia 2045; (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals* atau SDGs); (3) Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*/NUA); dan (4) Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045.

Gambar 2-1 Visi Ibu Kota Nusantara





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2.1.1 Visi Indonesia 2045

Pembangunan Ibu Kota Nusantara diarahkan untuk mendukung perwujudan tujuan nasional dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mendukung perwujudan Visi Indonesia 2045, yaitu Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur; serta cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Visi Indonesia Tahun 2045 dibangun dengan 4 (empat) pilar yang mempertimbangkan megatren global hingga tahun 2045. Keempat pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045 tersebut adalah: (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pilar Pembangunan Indonesia 2045 menjadi dasar pengembangan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menjadi standar pengembangan kawasan masa depan sebagai bagian dari impian Indonesia 2045 yakni: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara mendukung perwujudan TPB yang mencakup 17 tujuan yang didasarkan dari tiga skala berbeda, yaitu (1) Manusia (*people*), memenuhi kebutuhan dasar manusia; (2) Tempat (*place*), lingkungan manusia yang tangguh; dan (3) Bumi (*planet*), berkontribusi untuk masa depan global yang berkelanjutan.

2.1.3 Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*/NUA)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Berkelanjutan dan Kota Dunia untuk Semua sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Agenda Baru Perkotaan (NUA). NUA merupakan komitmen global yang digagas United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat) bersama delegasi dari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

140 negara untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). Berdasarkan Agenda Baru Perkotaan, perumusan visi Ibu Kota Nusantara 'Kota Dunia untuk Semua' mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan sebagai berikut: (1) Inklusif dan Partisipatif; (2) Responsif Gender dan Usia; (3) Efektif, Efisien, dan Produktif; (4) Mudah Diakses dan Terjangkau; (5) Terpadu; (6) Transparan dan Akuntabel; dan (7) Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan.

2.1.4 Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045

Perumusan Visi Ibu Kota Nusantara memperhatikan KPN 2045 sebagai penjabaran kebijakan perkotaan dalam Agenda TPB/SDGs dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) yang sudah diterapkan dalam konteks Indonesia. KPN ini menjadi payung kebijakan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia, termasuk juga Ibu Kota Nusantara. KPN ini memuat lima misi pembangunan sebagai berikut: (1) Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional yang Seimbang, Menyejahterakan, dan Berkeadilan; (2) Mendorong Kota yang Layak Huni, Inklusif, dan Berbudaya; (3) Mendorong Kota yang Maju dan Menyejahterakan; (4) Mendorong Kota yang Hijau dan Tangguh; dan (5) Mewujudkan Tata Kelola Perkotaan yang Transparan, Akuntabel, Cerdas, dan Terpadu.

2.2 Prinsip dan Indikator Kinerja Utama Ibu Kota Nusantara

2.2.1 Prinsip Ibu Kota Nusantara

Dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada delapan prinsip, yaitu:

1. Mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau.
2. Menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan kemudahan akses dan waktu tempuh, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk.
4. Mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon.
5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

6. Menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh penduduknya termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
7. Menciptakan kota yang efektif dan efisien berbasis teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan aktivitas penduduknya.
8. Menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujudnya pendapatan per kapita yang tinggi, dan rendahnya kesenjangan ekonomi.

Prinsip tersebut menjadi pedoman kebijakan dan strategi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Prinsip tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (KPI) sebagai tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan sekaligus sebagai acuan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 2-2 Tema berdasarkan Prinsip KPI Ibu Kota Negara

Prinsip	Tema	Target	KPI
Selaras dengan Alam  <ol style="list-style-type: none">1. Solusi berbasis alam2. Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau3. Restorasi hutan4. Konservasi habitat dan ekosistem (termasuk kehidupan laut)	Bhinneka Tunggal Ika  <ol style="list-style-type: none">1. Integrasi semua lapisan masyarakat2. Akses ke ruang komunitas/kultural/sipil/publik3. Peningkatan ketahanan sosial	Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses  <ol style="list-style-type: none">1. Transportasi yang aktif dan berkelanjutan2. Lingkungan yang mengedepankan berjalan kaki3. Akses yang nyaman ke fasilitas dasar, sosial, dan masyarakat (termasuk pendidikan dan kesehatan)4. Konektivitas regional	Rendah Emisi Karbon  <ol style="list-style-type: none">1. Energi terbarukan2. Efisiensi energi3. Optimalisasi dan pengurangan penggunaan energi
Sirkuler dan Tangguh  <ol style="list-style-type: none">1. Air, energi, dan ketahanan suplai pangan2. Membangun ketahanan masyarakat3. Adaptasi perubahan iklim	Aman dan Terjangkau  <ol style="list-style-type: none">1. Keamanan pribadi/persepsi keamanan2. Akses ke perumahan terjangkau3. Suplai yang cukup untuk perumahan yang aman, beragam, dan terjangkau	Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi  <ol style="list-style-type: none">1. Konektivitas dan akses digital2. Infrastruktur yang siap secara digital3. Keterlibatan dan pelayanan warga	Peluang Ekonomi untuk Semua  <ol style="list-style-type: none">1. Pertumbuhan dan peningkatan PDB yang tinggi2. Akses ke pekerjaan3. Mendukung model bisnis ekonomi sirkuler4. Ketahanan ekonomi

2.2.2 KPI Ibu Kota Nusantara

KPI Ibu Kota Nusantara merupakan pendekatan penilaian yang berfokus pada hasil dengan memberi ruang bagi pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang lebih inovatif, fleksibel, adaptif dan lincah (*agile*); pengambilan keputusan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

lebih cepat, akurat dan efektif; serta penguatan koordinasi dan pengembangan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi yang lebih luas antara Pemerintah, pelaku usaha swasta, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan media.

KPI digunakan sebagai acuan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. KPI menjadi sebuah perangkat penilaian untuk:

1. mengukur keberhasilan perwujudan visi dan pencapaian tujuan dan target KPI Ibu Kota Nusantara;
2. mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara secara efisien dan efektif;
3. mengukur keberhasilan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara;
4. memberikan informasi dini (*early warning*) tentang hambatan dan tindakan mitigasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara; dan
5. memberikan informasi dalam pengendalian dan evaluasi (*safeguarding*) pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

2.2.3 Target KPI Ibu Kota Nusantara

KPI Ibu Kota Nusantara yang disusun berdasarkan delapan prinsip Ibu Kota Nusantara memuat 24 target KPI. Penetapan target dilakukan dengan memadukan antara perspektif *bottom-up*, *top-down*, dan komitmen pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Gambar 2-3 Ringkasan Target KPI

1. Selaras Dengan Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler dan Tangguh	6. Aman dan Terjangkau	7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
<p>1.1 >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)</p>	<p>2.1 100% integrasi seluruh penduduk</p>	<p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p>	<p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara</p>	<p>5.1 >10% dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p>	<p>6.1 Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045</p>	<p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh PBB</p>	<p>8.1 0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035</p>
<p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p>	<p>2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit</p>	<p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p>	<p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p>	<p>5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p>	<p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p>	<p>7.2 100% konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis</p>	<p>8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi</p>
<p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian</p>	<p>2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif</p>	<p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030</p>	<p>4.3 Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha</p>	<p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p>	<p>6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.</p>	<p>7.3 >75% kepuasan dunia usaha atas layanan digital</p>	<p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Target KPI Ibu Kota Nusantara disusun dengan memperhatikan jangka waktu sampai dengan tahun 2045, serta fokus kawasan baik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan Wilayah Ibu Kota Nusantara. Wilayah Ibu Kota Nusantara memiliki total luas 256.142 hektare yaitu total luasan dari Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN), Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Target ini dicapai dengan menerapkan prinsip dasar pembangunan dan strategi yang dijabarkan di dalam Bab III.

Tabel 2-1 Target KPI Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Kawasan

Prinsip	Deskripsi KPI		Wilayah Ibu Kota Nusantara	KIKN	KIPP
			2045	2045	2045
1. Selaras dengan Alam	1.1	>75% dari 256.142 hektare area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)	75%	50%	50%
	1.2	100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	Strategis	100%	100%
	1.3	100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	Strategis	100%	100%
2. Bhinneka Tunggal Ika	2.1	100% integrasi seluruh penduduk	100%	100%	100%
	2.2	100% warga dapat menjangkau layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	Strategis	100%	100%
	2.3	100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	Strategis	100%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Prinsip	Deskripsi KPI		Wilayah Ibu Kota Nusantara	KIKN	KIPP
			2045	2045	2045
3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses	3.1	80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	Strategis	100%	80%
	3.2	10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	Strategis	100%	100%
	3.3	<50 menit koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030	-	<50 menit	<50 menit
4. Rendah emisi karbon	4.1	Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	100%	100%	100%
	4.2	60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	Strategis	70%	70%
	4.3	<i>Net zero emission</i> untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 hektare	<i>Net-Zero</i>	Strategis	Strategis
5. Sirkular dan tangguh	5.1	>10% dari lahan 256.142 hektare tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	>10%	Strategis	Strategis
	5.2	60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	Strategis	60%	60%
	5.3	100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	Strategis	100%	100%
6. Aman dan terjangkau	6.1	<i>Ranking</i> 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045	Strategis	Top 10	Strategis
	6.2	Permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada tahun 2045	100%	100%	100%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Prinsip	Deskripsi KPI		Wilayah Ibu Kota Nusantara	KIKN	KIPP
			2045	2045	2045
	6.3	Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang	100%	100%	100%
7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi	7.1	Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	7.2	100% konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis	Strategis	100%	100%
	7.3	>75% Kepuasan Dunia Usaha atas Layanan Digital	Strategis	Strategis	Strategis
8. Peluang ekonomi untuk semua	8.1	0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035	Strategis	0%	0%
	8.2	Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita negara (setara ekonomi) berpendapatan tinggi	Strategis	Strategis	Strategis
	8.3	Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada tahun 2045	Strategis	Terendah di Indonesia	Strategis

Keterangan:

Strategis: menyesuaikan kondisi saat tahun tersebut.